

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR FINANCIAL YEAR 2025*

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO)

Jakarta, 30 Maret 2026



INFORMASI RAPAT

Meeting Information



Hari/ Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Day/Date Tuesday, April 21, 2026



Waktu : 13.30 WIB - selesai
Time 13.30 WIB - finished



Tempat : Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa
Venue Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta Pusat, 10110



Mekanisme Rapat: Accessing the facility of KSEI *Meeting Mechanism* Electron General Meeting System ("eASY.KSEI") at <https://akses.ksei.co.id/> provided Kustodian Sentral EfekIndonesia ("KSEI")



Mata Acara *Meeting Agenda*

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan Penetapan Remunerasi, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2026 serta Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2025 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2026.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Initial Public Offering ("IPO") Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana IPO Perseroan.
7. Laporan Pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program ("MESOP") dan Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Meningkatkan Modal Disetor dan Ditempatkan Secara Penuh dalam rangka Pelaksanaan MESOP.
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

1. *Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Consolidated Financial Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2025, including the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*
2. *Approval of the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025.*
3. *Approval of the determination of remuneration, allowances, and other benefits for the financial year 2026, as well as performance bonuses (tantiem) for the financial year 2025 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*
4. *Approval of the Appointment of a Public Accountant Firm to conduct the audit of the Company's Financial Statement for the Financial Year 2026.*
5. *Report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering (IPO).*
6. *Approval of changes to the use of proceeds from the Company's IPO.*
7. *Report on the implementation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) and approval to grant authority to the Board of Commissioners to increase the Company's issued and paid-up capital in connection with the implementation of the MESOP.*
8. *Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.*
9. *Approval of Changes in the Company's Management.*



Mata Acara Pertama

First Meeting Agenda

Mata Acara Rapat

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) ; dan
2. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan bahwa Laporan Tahunan memerlukan persetujuan RUPS, dimana termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Agenda of the Meeting

Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Consolidated Financial Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2025, including the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Legal Basis and Regulation

1. *Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company (“Company Law”); and*
2. *Article 9 paragraph (4) letter a and b of the Company’s Articles of Association that the Annual Report requires GMS approval, which includes the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements that require GMS ratification.*



Mata Acara Pertama

First Meeting Agenda

Penjelasan

1. Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 yang akan dimintakan dalam persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.pge.pertamina.com) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025 yang akan dimintakan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.pge.pertamina.com) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
3. Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam Laporan No. 00124/2.1505/AU.1/02/1726-5/1/III/2026 tanggal 8 Maret 2026 dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material".

Explanation

1. *The Annual Report including the Board of Commissioner's Supervisory Report for Financial Year of 2025 which will be requested for approval at the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year of 2025 has been uploaded and can be downloaded via the Company's website (www.pge.pertamina.com) and the Indonesian Stock Exchange's website (www.idx.co.id) at the same time as the date of the notice.*
2. *The Consolidated Financial Statement of the Financial Year 2025 which will be requested for ratification at the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 have been uploaded and can be downloaded through the Company's website (www.pge.pertamina.com) and the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id) at the same time as the date of notice.*
3. *The Financial Statement for the Financial Year of 2025 ended on December 31, 2025 have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) as contained in Report No. 00124/2.1505/AU.1/02/1726-5/1/III/2026 dated March 8, 2026 with the opinion that "The consolidated financial statements present fairly in all material respects".*



Mata Acara Kedua

Second Meeting Agenda

Mata Acara Rapat

Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT; dan
2. Pasal 9 ayat (4) huruf c jo. Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan bahwa penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

Agenda of the Meeting

Approval of the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025.

Legal Basis and Regulation

1. *Article 70 and 71 paragraph (1) of Company Law; and*
2. *Article 9 paragraph (4) letter c jo. Article 22 of the Company's Articles of Association, determine that the utilization of the net profit is decided in GMS.*



Mata Acara Kedua

Second Meeting Agenda

Penjelasan

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT, penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 memerlukan persetujuan RUPS.
2. Penggunaan Laba Tahun Buku 2025 yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Pertamina Geothermal Energy Tbk penggunaan mengacu pada prospektus dan kebijakan internal perusahaan, untuk penetapannya akan dilakukan pada saat pelaksanaan RUPS.

Explanation

1. Pursuant to the provisions in the Articles of Association and Company Law, the determination on utilization of the Company's Net Profit for Financial Year 2025 requires GMS approval.
2. The utilization of the net profits Year 2025 that attributable to the Owners of the Parent Entity PT Pertamina Geothermal Energy Tbk refers to the prospectus and internal company policies, the determination of net profit shall be resolved in the GMS.



Mata Acara Ketiga

Third Meeting Agenda

Mata Acara Rapat

Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2026 serta Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2025 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 13/MBU/09/2021; dan
3. Pasal 14 ayat (16) dan Pasal 18 ayat (4) huruf C.XIII Anggaran Dasar Perseroan bahwa (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Agenda of the Meeting

Approval of the determination of remuneration, allowances and other facilities in the financial year 2026, and performance awards (Tantiem) in the financial year 2025 for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Legal Basis and Regulation

1. Article 96 and Article 113 of Company Law;
2. Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Boards of SOEs as last amended by Regulation of the Minister of SOEs No. PER- 13/MBU/09/2021; and
3. Article 14 paragraph (16) and Article 18 paragraph (4) letter C.XII of the Company's Articles of Association that (i) the amount of salary and allowances of members of the Board of Directors shall be determined by resolution of the GMS and may be delegated to the Board of Commissioners and (ii) the provision of salary or honorarium and allowances of the Board of Commissioners shall be determined by the GMS.



Mata Acara Ketiga

Third Meeting Agenda

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Explanation

Pursuant to the provisions of the Company's article of Association, the amount of salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be determined by the GMS, where the authority of the GMS to determine the salaries and allowances of the Board of Directors of the Company can be delegated to the Board of Commissioners of the Company.



Mata Acara Keempat

Fourth Meeting Agenda

Mata Acara Rapat

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2026.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”);
2. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK 9/2023”); dan
3. Pasal 9 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Agenda of the Meeting

Approval of the Appointment of a Public Accountant Firm to conduct the audit of the Company’s Financial Statement for the Financial Year 2026.

Legal Basis and Regulation

1. *Article 59 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”);*
2. *Article 3 of Financial Services Authority Regulation Number 9 Year 2023 on Utilization of the Services of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities (“POJK 9/2023”); and*
3. *Article 9 paragraph (4) letter of the Company’s Articles of Association that the appointment of a registered Public Accountant Firm to audit the Financial Statements requires GMS approval.*



Mata Acara Keempat

Fourth Meeting Agenda

Penjelasan

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPS.

Explanation

Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association, the appointment of Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority who will examine the Company's Financial Statement for Financial Year of 2025 including Internal Control Audit on the Reporting proposed by the Board of Commissioners by taking into consideration recommendation from the audit committee to be further decided by the GMS.



Mata Acara Kelima

Fifth Meeting Agenda

Mata Acara Rapat

Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 30/2015”); dan

Penjelasan

Sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dinyatakan bahwa Perseroan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sepenuhnya.

Agenda of the Meeting

Report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering (IPO).

Legal Basis and Regulation

1. *Articles 6 and 7 of Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Public Offering Proceeds ('POJK 30/2015'); and*

Explanation

According to Article 6 and Article 7 of POJK 30/2015 regarding Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's IPO, that the Listed Company must take account for realization of the use of the initial public offering proceeds in every annual GMS until all the Initial Public Offering proceeds have been realized completely.



Mata Acara Keenam

Sixth Meeting Agenda

Mata Acara Rapat

Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana IPO Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 30/2015”).

Penjelasan

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum di mana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Agenda of the Meeting

Approval of changes to the use of proceeds from the Company's IPO.

Legal Basis and Regulation

1. *Articles 9 of Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Public Offering Proceeds (“POJK 30/2015”).*

Explanation

According to Article 9 of POJK 30/2015 regarding Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's IPO, changes to the use of proceeds from Public Offerings must first obtain the approval of the GMS.



Mata Acara Ketujuh

Seventh Meeting Agenda

Mata Acara Rapat

Laporan Pelaksanaan **Program MESOP** dan **Persetujuan Pemberian Kuasa** kepada Dewan Komisaris untuk Meningkatkan Modal Disetor dan Ditempatkan secara penuh dalam Rangka Pelaksanaan Program MESOP.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. POJK No. 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Surat Edaran Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. SE-00002/BEI/03-2020 perihal Tata Cara Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham tertanggal 2 Maret 2020;
3. Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00475/BEI.PP3/05-2023 perihal Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dan Pra Pencatatan Saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk tertanggal 23 Mei 2023;
4. Surat Keterangan PT Datindo Entrycom No. DE/X/2025-2887 selaku Biro Administrasi Efek Perseroan perihal Penambahan Saham Baru Perseroan Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP I, II & II per tanggal 3 Oktober 2025; dan
5. Surat Perseroan No. 062/PGE500/2026-S0 perihal Keterbukaan Informasi Stock Option Program (MESOP) (Exercise Kelima), Tahap II (Exercise Keempat), dan Tahap III (Exercise Kedua) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk tertanggal 13 Februari 2026.

Agenda of the Meeting

Report on the implementation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) and approval to grant authority to the Board of Commissioners to increase the Company's issued and paid-up capital in connection with the implementation of the MESOP.

Legal Basis and Regulation

1. POJK No. 38/POJK.04/2014, concerning Capital Increase of Public Companies Without Pre-emptive Rights;
2. Circular Letter of the Board of Directors of Indonesia Stock Exchange No. SE-00002/BEI/03-2020 regarding Procedures for Implementing the Share Ownership Program dated on March 2, 2020;
3. Announcement of PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00475/BEI.PP3/05-2023 regarding Listing of Equity Securities and Pre-Listing of Shares of PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dated on May 23, 2023;
4. Statement Letter of PT Datindo Entrycom No. DE/X/2025-2887 as the Securities Administration Bureau of the Company regarding the Addition of New Shares of the Company as a result of the MESOP I, II & III Option Exercise dated on October 3, 2025; and
5. Company Letter No. 062/PGE500/2026-S0 regarding Disclosure of Information Related to the Implementation Plan of Management and Employee Stock Option Program (MESOP) Phase I (Fifth Exercise), Phase II (Fourth Exercise), and Phase III (Second Exercise) of PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dated February 13, 2026.



Mata Acara Ketujuh

Seventh Meeting Agenda

Penjelasan

Dalam rapat akan diusulkan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor secara penuh sebagai hasil pelaksanaan Program MESOP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Explanation

The meeting will propose granting authority to the Board of Commissioners to approve an increase in issued and fully paid-up capital as a result of implementing the MESOP Program for a period of 1 (one) year.



Mata Acara Kedelapan

Eighth Meeting Agenda

Mata Acara Rapat

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 19 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai perubahan anggaran dasar yang ditetapkan oleh RUPS.
2. Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Perubahan Anggaran Dasar yang mana perubahan anggaran dasar membutuhkan persetujuan dalam RUPS.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dimana Perseroan diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS atas Perubahan Kegiatan Usaha termasuk juga memaparkan Studi Kelayakan.

Agenda of the Meeting

Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.

Legal Basis and Regulation

1. *Article 19 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies regarding amendments to the articles of association stipulated by the GMS.*
2. *Article 12 of the Company's Articles of Association regarding amendments to the Articles of Association which amendments to the articles of association shall be decided on GMS.*
3. *Financial Services Authority Regulation No. No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities where the Company is required to obtain GMS approval for Changes in Business Activities including also presenting a Feasibility Study.*



Mata Acara Kedelapan

Eighth Meeting Agenda

Penjelasan

1. Persetujuan hasil studi kelayakan oleh KJPP untuk penambahan KBLI berikut:
 - a) 63101 – Aktivitas Pengolahan Data
 - b) 63102 – Aktivitas Penyediaan Infrastruktur Komputasi, Hosting dan Aktivitas Terkait
 - c) 77395 - Penyewaan dan Sewa Guna Mesin dan Peralatan Pertambangan dan Penggalian.
2. Dalam rapat akan diusulkan Persetujuan penyesuaian dan pemutakhiran kode KBLI dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.

Explanation

1. *Approval of the feasibility study results by KJPP for the addition of the following KBLI codes:*
 - a) *63101 – Data Processing Activities*
 - b) *63102 – Provision of Computing Infrastructure, Hosting and Related Activities*
 - c) *77395 – Leasing and Hire of Mining and Quarrying Machinery and Equipment.*
2. *At the meeting, approval will be sought for the adjustment and updating of the KBLI codes in the Company's Articles of Association in accordance with the provisions of BPS Regulation No. 7 of 2025.*



Mata Acara Kesembilan

Ninth Meeting Agenda

Mata Acara Rapat

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 3 jo. Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Pasal 14 ayat jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa pengangkatan, pemberhentian, atau perubahan susunan pengurus Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS;

Penjelasan

1. Dalam Rapat akan diusulkan agenda perubahan susunan Pengurus Perseroan
2. Daftar Riwayat Hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan

Agenda of the Meeting

Approval of Changes in the Company's Management.

Legal Basis and Regulation

1. Article 3 jo. Article 22 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
2. Article 14 jo. Article 18 of the Company's Articles of Association, that the appointment, replacement, or dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners requires approval from the GMS;

Explanation

1. At the Meeting, an agenda for changes to the composition of the Company's Management will be proposed.
2. The Curriculum Vitae of the prospective Company Management candidates to be appointed will be available no later than the time the Meeting is held.



*Terima
Kasih*

